

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah 65 tahun berkuat dengan kebijakan luar negeri yang terpusat pada Semenanjung Korea dan hubungannya dengan kekuatan regional inti di Asia Timur, Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae-in akhirnya memperbarui orientasi hubungan luar negerinya ke arah Selatan melalui *New Southern Policy*. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan luar negeri Korea Selatan, yang menekankan pada penguatan keterlibatan dengan negara-negara ASEAN ke tingkat yang sama dengan *4 Majors Partner*. Secara umum, kebijakan NSP dihadirkan dengan tiga tujuan dasar, yakni (1) memperluas orientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan, (2) mengatasi ambiguitas dari pergeseran geopolitik regional, dan (3) memaksimalkan manfaat dari nilai strategis kawasan ASEAN bagi hubungan luar negeri Korea Selatan.

New Southern Policy memberikan keunggulan dan prioritas yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada negara-negara ASEAN dalam hubungan luar negeri Korea Selatan. Kebijakan ini berhasil membawa ASEAN dari kursi belakang ke barisan terdepan mitra strategis Korea Selatan sejak diluncurkan pada tahun 2017. NSP memberikan konsistensi dan keberlanjutan yang dibutuhkan dalam keterlibatan Korea Selatan dengan ASEAN. Implementasi NSP mencakup tiga pilar kerja sama, yaitu *people* yang berfokus pada kerja sama berorientasi masyarakat, *prosperity* yang berfokus pada kerja sama ekonomi, dan *peace* yang berfokus pada bidang kerja sama keamanan. Kebijakan ini ditandai dengan komitmen pribadi Presiden Moon Jae-in yang kuat dalam berbagai inisiatif kerja sama, termasuk

meningkatkan struktur kelembagaan untuk mengawasi pelaksanaan NSP melalui pembentukan komite khusus, yakni *presidential committee*, yang bertanggung jawab atas kebijakan, meningkatkan status kemitraan dengan beberapa negara ASEAN. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga ditunjukkan melalui penguatan diplomasi proaktif dengan ASEAN, penguatan integrasi ekonomi melalui penandatanganan sejumlah perjanjian perdagangan bebas, prioritas dalam proyek-proyek pembangunan bersama, keterlibatan aktif dalam dialog keamanan regional, serta memperluas kolaborasi di sektor pertahanan guna memperkuat stabilitas kawasan dan meningkatkan kemitraan strategis antara Korea Selatan dan ASEAN.

Dalam mengelaborasi kepentingan Korea Selatan melalui NSP di ASEAN, konsep *national interest* dari Charles Chong-Han Wu menjadi landasan eksplorasi yang relevan. Wu mengidentifikasi bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat dilihat melalui tiga dimensi dasar, yaitu keamanan, komunitas, dan ekonomi, dengan masing-masing dimensi tersebut memuat tiga indikator yang merepresentasikan kepentingan khusus dari kebijakan suatu negara. Terkait hal ini, dapat diidentifikasi jika terdapat tiga kepentingan yang saling berkaitan dari inisiasi NSP Korea Selatan di kawasan ASEAN. Pertama, dalam dimensi ekonomi, Korea Selatan mencari peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dengan berupaya mengamankan pangsa pasar baru di ASEAN, dan mendiversifikasi mitra dagangnya untuk mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional, seperti AS, Tiongkok, dan Jepang. Kedua, dalam dimensi komunitas, kepentingan Korea Selatan dalam NSP didasarkan pada kebutuhan untuk mendiversifikasi hubungan diplomatik, meningkatkan peran strategis di komunitas internasional, dan adanya kesepahaman prinsip politik luar negeri yang dianut oleh Korea Selatan dan negara-negara

ASEAN. Ketiga, dalam dimensi keamanan, Korea Selatan hendak mencapai kepentingan politis untuk menjaga peran aktif dari negara-negara ASEAN sebagai mediator dan *peacebuilder* dalam agenda keamanan regional di Semenanjung Korea, sekaligus kepentingan komersial untuk memperluas kapasitas penjualan alat militer kepada negara di kawasan tersebut.

Dari keseluruhan substansi yang telah diuraikan, melalui penelitian ini peneliti berpendapat bahwa *New Southern Policy* di masa pemerintahan Moon Jae-in merupakan terobosan dan awal yang baru bagi Korea Selatan untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN dan negara anggotanya. Kebijakan ini mencerminkan apa yang sebelumnya hilang dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan dan kebijakan terhadap ASEAN khususnya. NSP berupaya menghadirkan pembaharuan dari fenomena ketidakkonsistenan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap ASEAN di pemerintahan sebelumnya dan menemukan validitas bagi ASEAN dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan, mengingat krusialnya kawasan ini bagi kelangsungan kepentingan nasional negara berkekuatan menengah tersebut.

Pada dasarnya, kebijakan NSP merupakan bagian dari teka teki geopolitik Korea Selatan untuk memperluas jangkauan kebijakan luar negeri di luar lingkup prioritas tradisionalnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh strategis Korea Selatan dan memenuhi peran Korea sebagai kekuatan menengah secara multilateral, yang pada akhirnya dapat mengurangi belenggu negara ini untuk memihak dalam persaingan negara adikuasa yang juga mitra terdekatnya. Dengan demikian, NSP mencerminkan keharusan strategis bagi Korea Selatan untuk mendiversifikasi hubungan ekonomi eksternal, mempertahankan arsitektur

regional yang terbuka dan inklusif, serta mengurangi tekanan geopolitik yang dapat timbul dari ketegangan antara negara-negara besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan terkait hal yang menjadi kepentingan dasar Korea Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya di kawasan ASEAN, peneliti menyadari jika masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pengerjaan penelitian ini, baik dari sisi ketersediaan data dan informasi, kekeliruan penulisan, hingga relevansi substansi penelitian. Adapun beberapa substansi yang peneliti nilai masih kurang tersorot dalam penelitian, diantaranya ialah (1) penjelasan terkait implementasi kebijakan NSP dalam penelitian ini hanya membatasi fokusnya pada *ASEAN Member States* secara luas, sementara itu agenda kebijakan ini memuat sebelas negara menjadi fokus NSP, termasuk 10 negara anggota ASEAN ditambah India; (2) penelitian ini cenderung menitikberatkan pada pembahasan terkait kebijakan *New Southern Policy* itu sendiri. Sedangkan, dalam proses implementasinya, NSP mengalami perubahan relevansi menjadi NSP+ atau NSP Plus di masa Pandemi COVID-19; (3) analisis dalam penelitian ini lebih ditujukan untuk melihat kepentingan nasional Korea Selatan dalam pembaharuan kebijakan luar negeri terhadap AMS, di mana penelitian ini kurang menyoroti sisi lainnya dari implementasi kebijakan NSP.

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sarankan sebagai bentuk pengembangan terhadap ruang lingkup topik penelitian ini. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam penelitian terkait *New Southern Policy* di tingkat bilateral, dengan mengambil sampel kerja sama bilateral antara Korea Selatan dengan salah satu negara anggota ASEAN atau India, agar

lebih terlihat dengan jelas bagaimana implementasi dan implikasi kebijakan NSP yang berlaku secara khusus di negara tertentu. Kedua, peneliti berharap agar peneliti lainnya dapat lebih mengeksplor topik terkait NSP Plus, yang juga merupakan bagian penting dari pengembangan kebijakan NSP, karena masih awam penelitian yang membahas tentang evolusi kebijakan tersebut. Terakhir, peneliti juga menyarankan agar cakupan isu dari kebijakan NSP dapat dikembangkan dengan lebih luas. Hal ini dapat ditinjau dengan melihat variasi variabel penelitian ini secara lebih beragam, seperti hambatan dan tantangan dalam proses implementasi kebijakan NSP, korelasi antara NSP dengan strategi *soft power* Korea Selatan di negara target NSP, atau pun hubungan antara kebijakan NSP dengan identitas *middle power* yang melekat pada Korea Selatan sebagai sebuah negara.

Selama proses penelitian dilakukan, peneliti mendapati indikasi adanya unsur demografi dibalik inisiasi kebijakan NSP melalui pendekatan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered approach*) dalam pilar *people* NSP. Pendekatan ini secara khusus bertujuan memperkuat hubungan Korea Selatan dengan ASEAN dan India, dua kawasan berpenduduk besar. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian lanjutan diharapkan mampu mengeksplorasi alasan di balik fokus Korea Selatan pada pendekatan berbasis masyarakat terhadap ASEAN dan India, khususnya dalam konteks krisis demografi yang tengah dihadapi Korea Selatan. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan Hubungan Internasional dan memberikan *insight* serta relevansi tambahan bagi penelitian-penelitian berikutnya.